



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KECAMATAN LORE TENGAH KABUPATEN POSO

Kardinal

Universitas Tadulako

Hartawan

Universitas Tadulako

Sitti Chaeriah

Universitas Tadulako

Korespondensi penulis: ddipikoro0903@email.com

Abstract. *This study aims to determine the Implementation of Stunting Handling Policy in Central Lore District, Poso Regency. This study used a method with descriptive qualitative data. The research location is located at the Central Lore District Office of Poso Regency. The theory used in this study is the theory proposed by George C. Edwards III (1980). The informants in this study amounted to 11 (eleven) people. The data obtained in this study are from observations, interviews, and documentation. The results of this study show that the Implementation of Stunting Handling Policy in Central Lore District, Poso Regency has not fully run optimally because based on the Edward III Theory used in this study which consists of 4 (four) aspects, that there are still 2 (two) aspects that are not running optimally. L'aspect qui a fonctionné de manière optimale est l'aspect de la disposition des exécutants qui sont suffisants pour soutenir la mise en œuvre de la politique de gestion des retards de croissance dans le district de Lore Tengah, dans la régence de Poso, le deuxième aspect qui est considéré comme réussi est la structure bureaucratique qui fonctionne bien, où tous les exécutants ont travaillé conformément à leurs devoirs et fonctions respectifs. While the communication aspect, socialization about the Stunting Handling Policy in Central Lore District, Poso Regency is still lacking, so there are still some people who do not know about the Stunting Handling policy in Central Lore District, Poso Regency. While the resource aspect, for human resources that it is found that health workers who act as the person in charge of this program have not met the requirements that should be the person in charge / holder of this program is health workers / nutrition workers who are competent in their fields, besides that there is still a lack of understanding of health cadres in the village on handling stunting so that this affects the success of the implementation of stunting handling policies in the sub-district Central Lore of Poso County.*

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan metode dengan data kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang di kemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 (sebelas) orang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena berdasarkan Teori Edward III yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) aspek, bahwa masih terdapat 2 (dua) aspek yang kurang berjalan secara optimal. Aspek yang sudah berjalan secara optimal yaitu aspek disposisi para implementor yang cukup mendukung implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kab. Poso, aspek kedua yang dinilai berhasil adalah struktur birokrasi yang sudah berjalan dengan baik, dimana semua implementor sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan aspek komunikasi, sosialisasi tentang Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso dirasakan masih kurang sehingga masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso. Sedangkan aspek sumber daya, untuk sumber daya manusia bahwa ditemukan tenaga kesehatan yang berperan sebagai penanggung jawab dalam program ini belum memenuhi syarat yang seharusnya penanggung jawab/pemegang program ini adalah tenaga kesehatan/tenaga gizi yang berkompeten dalam bidangnya, selain itu juga masih kurangnya pemahaman Kader kesehatan yang ada di desa terhadap penanganan stunting sehingga hal ini berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso.

Kata kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

LATAR BELAKANG

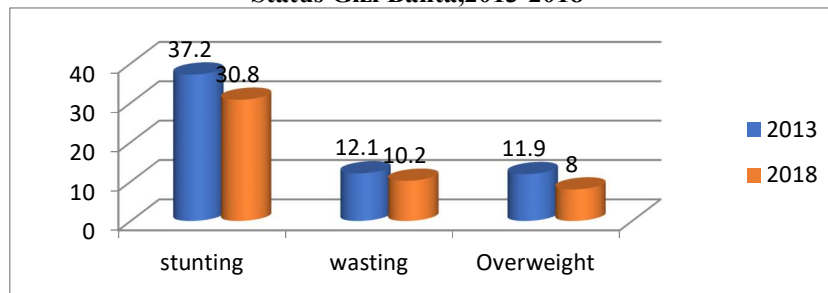
Indonesia adalah sebuah negara dengan luas mencapai 1,905 juta km² yang terhampar dari ujung barat sampai timur. Secara administratif negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang dimana daerah provinsi pula dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota terdiri atas kecamatan-kecamatan yang merupakan gabungan dari desa/kelurahan. Dalam pembukaan UUD Tahun 1945 alinea IV menjelaskan bahwa maksud dan tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum tersebut dapat ditempuh melalui pembangunan. Pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum berbagai macam bentuknya. Keberhasilan suatu pembangunan dapat terjadi karena adanya kerja sama berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Dewasa ini berbagai masalah di bidang kesehatan sedang membayangi negara Indonesia. Kualitas kesehatan menjadi aspek penting dalam hal produktivitas dan kemampuan untuk mengembangkan diri. Saat ini persoalan penanganan *Stunting*, penyakit kronis, pandemic Covid-19 dan sebagainya masih tinggi. Pembangunan kesehatan menjadi agenda prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pembangunan kesehatan menjadi agenda prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintah. Peningkatan dan pengelolaan kesehatan masyarakat adalah tujuan bangsa Indonesia dalam mencapai SDM yang berkualitas kedepannya. Bidang kesehatan memiliki peranan penting karena erat kaitannya mampu memberikan dengan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat. Korelasi diantaranya mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional Indonesia apabila berkesinambungan.

Pembangunan di bidang kesehatan diprioritaskan bersamaan dengan pembangunan di bidang lainnya. Setiap pelaksanaan pembangunan harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan jika diimbangi dengan implementasi yang baik. Pembangunan kesehatan ini juga tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*). Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan pembangunan dengan tujuan jangka panjang yang meliputi jangka waktu antargenerasi dan berusaha menyediakan sumber daya yang memadai dan lingkungan yang sehat bagi generasi selanjutnya di masa depan. Dalam artian bahwa pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk mempersiapkan masa yang akan datang serta menjamin keberlangsungan kehidupan kedepannya.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh secara normal pada balita dikarenakan kekuarangan asupan gizi kronis, yang mengakibatkan permasalahan pada tumbuh kembang. Pertumbuhan yang tidak wajar ini disebabkan tidak terpenuhinya gizi seimbang pada anak balita ketika masih dalam kandungan dan sejak dilahirkan. Menurut *Global Nutrition Report (2018)*, masalah gizi yang sering terjadi diantaranya yaitu *stunting*, *wasting* dan *overweight*. Berdasarkan data *Global Nutrition Report (2018)* menunjukkan bahwa sebanyak 22,2 % (150,8 Juta) balita di dunia mengalami *stunting*, sedangkan 7,5 % (50,5 Juta) mengalami *wasting* dan 5,6 % (38,3 juta) lainnya mengalami *overweight*. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan triple ganda permasalahan gizi. Hal ini ditunjukkan dari data hasil Riskesdas 2013 dan 2018 berikut :

Gambar 1.1
Status Gizi Balita, 2013-2018



Sumber : Riskesdas 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut menunjukkan bahwa permasalahan gizi di Indonesia masih Cukup serius. Salah satu yang menjadi fokus yaitu permasalahan *stunting* dimana pada tahun 2013 jumlah balita yang mengalami *stunting* sebanyak 37,2 % dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebanyak 30,8 %. Balita *stunting* selama jangka 5 tahun hanya mengalami penurunan sebanyak 6,4 % saja. World Health Organisation (WHO) menetapkan batas toleransi *Stunting* (anak bertubuh pendek) maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah seluruh balita, sementara untuk kasus *stunting* di Indonesia tercatat 35,6 persen (tahun 2017) dan menurun pada tahun 2018 sebesar 30,8 persen. Walaupun terjadi penurunan, faktanya kasus *stunting* di Indonesia masih melebihi batas toleransi WHO.

Indonesia termasuk dalam lima Negara dengan jumlah kasus *stunting* tertinggi di dunia. Negara mengakui bahwa tingkat *stunting* berada pada tingkat “krisis”. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk mengurangi *stunting* pada anak-anak untuk memastikan bangsa tumbuh subur di abad ke-21. Dengan meningkatkan kesetaraan kesempatan bagi semua anak bangsa, Indonesia meluncurkan strategi nasional baru tentang *stunting* pada Bulan Agustus 2017, dimana akar penyebab *stunting* bersifat kompleks dan multi-sektor dan membutuhkan upaya disemua tingkat pemerintahan.

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun), sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktifitas seseorang dimasa depan. Generasi penerus bangsa harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak *stunting*.

Kondisi tubuh anak yang pendek sering kali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bilah dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, *stunting* merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. *Stunting* disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam penanganan *stunting*, yaitu perbaikan terhadap pola makan, polah asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Seringkali masalah-masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah *stunting*, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Karena itu, penanganan *stunting* membutuhkan semua peran lintas sektor dan tatanan masyarakat. Intervensi yang plaign menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karena itu perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Menurut *World Health Organization* (WHO,2014) bahwa “*stunting* pada masa kanak-kanak adalah salah satu yang paling signifikan hambatan bagi perkembangan manusia, secara global mempengaruhi sekitar 162 juta anak dibawah usia 5 tahun. *Stunting* dapat diartikan sebagai tinggi yang lebih dari dua standar deviasi di bawah kesehatan Dunia”, selain itu memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang, yaitu :

1. Efek jangka pendek :
 - a. Peningkatan kejadian kematian yang meluas
 - b. Peningkatan mental, gerakan, dan verbal pada anak-anak tidak ideal ;dan
 - c. Meningkatnya pembiayaan
2. Efek jangka panjang :
 - a. Tinggi badan yang tidak ideal sebagai orang dewasa (lebih pendek pada umumnya);
 - b. Peningkatan risiko berat badan dan berbagai penyakit ;
 - c. Menurunnya kesejahteraan regeneratif;

- d. Batas dan pelaksanaan belajar yang tidak ideal selama tahun-tahun sekolah; dan
- e. Efisiensi dan batas kerja yang tidak ideal.

Diluar sektor kesehatan *stunting* dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi, baik skala mikro semata dalam keluarga maupun skala makro, dalam hal ini berpengaruh kepada meningkatnya anggaran belanja kesehatan nasional. Sehingga, dalam upaya percepatan perbaikan gizi dan penurunan *stunting* sangat dibutuhkan komitmen kuat berbagai pihak, baik pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga sosial masyarakat dan keagamaan, akademisi, organisasi profesi, media masa, dunia usaha/mitra pembangunan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan secara menyeluruh diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu perbaikan generasi masa tepat yang sehat dan produktif dan memiliki daya saing.

Sasaran/Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah usia 2 tahun menjadi 14%. Status gizi sangat erat dengan permasalahan *Stunting* di Indonesia, tingginya angka *Stunting* tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi berdampak pada tingkat pendapatan dan akses ke sumber daya ekonomi. Hal ini disebabkan *Stunting* bukan saja gagal tumbuh kembang secara fisik, akan tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan otak (cognitive). Berkaitan dengan hal tersebut, pada masa jabatan Presiden Joko Widodo dan berdasarkan Nawa Cita ke-5, *Stunting* dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang kemudian dilanjutkan dengan RPJMN 2020-2024, dimana tahun 2024 target prevelensi *Stunting* harus diturunkan sebesar 14%.

Penanganan *Stunting* sangat penting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Pelaksanaan Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada balita periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang menyumbang penurunan *Stunting* sebesar 30%. Intervensi ini menysasar masyarakat secara umum. Kegiatan Intervensi dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya diperoleh dalam waktu relative pendek. Sedangkan untuk Intervensi gizi sensitive ialah kegiatan yang dilaksanakan di luar sektor kesehatan yang menyumbang penurunan *Stunting* sebesar 70%.

Pendapatan akan mempengaruhi pemenuhan gizi keluarga dan kesempatan dalam mengikuti pendidikan formal. Penelitian di Semarang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga merupakan faktor resiko terjadinya *stunting* pada balita usia 24-36 bulan (Nasikhah dan Margawati,2012). Selain dikeluarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Antropometri Anak tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Kebijakan terkait penurunan *stunting* yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada pasal 1 dijelaskan bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, intergratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Pada pasal 3 Perpres No 72 Tahun 2021 dijelaskan juga bahwa pelaksanaan Percepatan penurunan stunting ini memiliki kelompok sasaran khusus yaitu kalangan remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak 0-59 bulan. (perpres No 72 Tahun 2021)

Sampai saat ini Perpres No 72 Tahun 2021 tersebut masih terus diimplementasikan diseluruh daerah di Indonesia dengan melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, akan tetapi pada pelaksanaannya kegiatan pencegahan stunting di Indonesia mengalami beberapa kendala. Pertama, sanitasi lingkungan yang kurang baik, dan minimnya rangsangan psikososial juga berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan. Anak yang terkena stunting dapat terhambat perkembangan otaknya. Setelah dewasa, kecerdasan performa edukasinya jadi tidak optimal, disamping bisa juga terkena resiko penyakit metabolic (Yadika et al,2019).

Kedua, faktor polah asuh yang kurang baik, kurangnya asupan makanan bergizi, dan pelayanan kesehtana yang belum optimal. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten

Pandeglang terkait pencegahan stunting pada era New Normal menunjukkan bahwa tingginya prevalensi angka stunting di Pandeglang disebabkan faktor-faktor tersebut.

Dengan diketahui hal tersebut pemerintah setempat membuat program untuk penurunan prevalensi angka stunting tersebut seperti program kesejahteraan dan perlindungan anak, program Kesehatan rujukan, program promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program air mineral dan penyehatan lingkungan, serta program perbaikan gizi masyarakat. (Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Candarmaweni, amy Yayuk Sri Rahayu 2020).

Ketiga, belum efektifnya strategi dan penanganan penurunan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu dibuktikan dengan masih tingginya prevalensi stunting di beberapa daerah Indonesia. Di daerah Sulawesi Tengah misalnya dapat dilihat angka prevalensi stunting di Sulawesi Tengah sebesar 28,2 %, meskipun angka stunting Sulawesi Tengah di bawah angka angka Nasional (30,8%) namun angka ini masih belum mencapai angka stunting yang direkomendasikan oleh WHO sebesar 20 %.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang masuk dalam prevalensi stunting diatas prevalensi nasional menurut Data SSGI pada Tahun 2022. Adapun salah satu daerah di wilayah provinsi Sulawesi Tengah yang memperlihatkan data stunting yaitu Kabupaten Poso dengan angka prevalensi stunting 24,6%. Namun prevalensi stunting masih lebih tinggi dari batas yang yang ditetapkan oleh WHO yaitu dibawah 20%.

Ditinjau dari tingginya persentase tersebut, Kabupaten Poso masuk sepuluh besar kabupaten prioritas penanggulangan stunting dari 12 kabupaten di Sulawesi Tengah yang diintervensi pada tahun 2022.

Kabupaten Poso masuk kedalam sepuluh besar kabupaten prioritas dalam penanganan stunting, pasalnya dapat dilihat bahwa prevalensi stunting dari tahun 2022 sebesar 26,7% dan 2023 sebesar 24,6% masih cukup tinggi. Dengan adanya hal tersebut pemerintah Kabupaten Poso terus menggecarkan program-program dalam upaya penurunan stunting. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Poso Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa. Di pasal 3 kebijakan tersebut, disebutkan bahwa peningkatan pelayanan publik diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting di tingkat desa dan kualitas sumber daya manusia, dalam implementasi penanggulangan stunting tersebut juga dibentuk penguatan kelembagaan dan keaja sama yang tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral akan tetapi membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah Desa di Kabupaten Poso. (Peraturan Bupati Poso Pasal 3 Nomor 22 tahun 2022).

Dalam hal penanganan *stunting* diperlukan intervensi semua semua lintas sektor, bukan hanya satu instansi saja melainkan keterlibatan semua tim lintas disiplin untuk menerapkan langkah-langkah integrasi. Keanggotaan yang terdiri dari multidisiplin harus mencakup kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, industry, masalah sosial, agama, komunikasi dan informasi, perusahaan umum/ penciptaan lapangan kerja/ perumahan dan pemukiman, dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak, keluarga berencana, pengendalian obat dan makan.

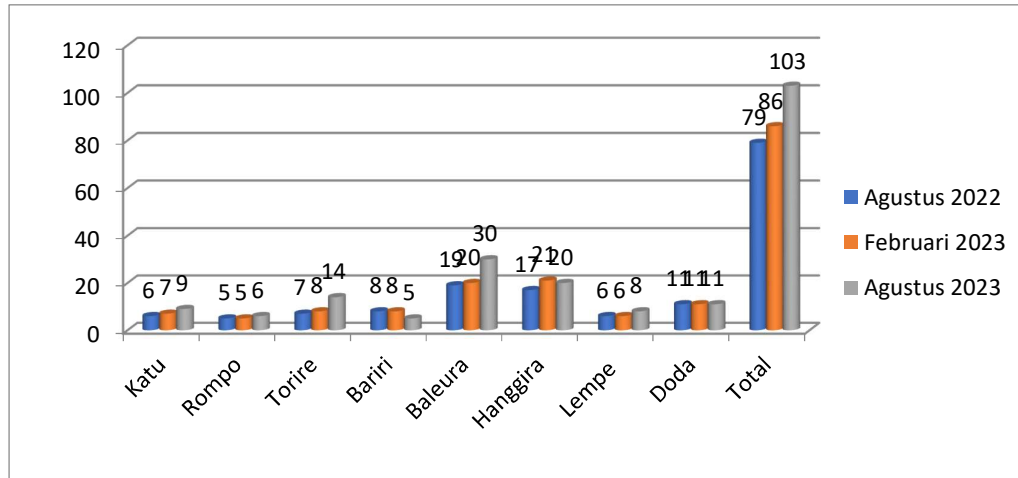
Dalam rangka implementasi program penanganan *stunting* juga disepakati 8 (Delapan) rencana aksi konvergensi yang meliputi :

1. Analisis Situasi Program Penanganan *Stunting*.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan.
3. Rembuk *Stunting*.
4. Peraturan Bupati/Walikota Tentang Peran Desa.
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia.
6. Sistem Manajemen Data *Stunting*.
7. Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting*.
8. Review kinerja tahunan.

Hasil observasi penulis yang dilakukan pada 2 (Dua) Desa di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso yaitu Desa Rompo dan Desa Baleura yang terdapat *Stunting* penulis dapat mengamati dari fenomena yang ada, masih belum sepenuhnya mengimplementasikan Kebijakan

Penanganan *Stunting* sesuai dengan peraturan yang ada. Ini terlihat dari terus meningkatnya *Stunting* di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso (data Gizi Puskesmas Doda Tahun 2022 dan 2023).

Gambar 1.2
Data Gizi Puskesmas Doda



Sumber: Data Gizi Puskesmas Doda 2024

Berdasarkan Gambar 1.2 tersebut menunjukkan bahwa permasalahan *Stunting* di Kecamatan Lore Tengah masih cukup serius. Salah satu yang menjadi fokus permasalahan *stunting* dimana tahun 2022 jumlah yang mengalami *stunting* sebanyak 22,3% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 29,3%. Balita *stunting* selama 2 tahun di Kecamatan Lore Tengah bukan mengalami penurunan namun mengalami peningkatan 7%.

Kecamatan Lore Tengah merupakan kecamatan tertinggi ke 5 (Lima) yang memiliki angka prevalensi *stunting* 25,4 %. Ini berbanding terbalik dengan visi misi pemerintah Kabupaten Poso dalam mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju Poso sehat yang tertuang dalam rencana strategi Dinas kesehatan Kabupaten Poso . Berbagai strategi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Poso telah diterapkan dalam penanganan *stunting* khususnya di Lore Tengah, salah satunya melalui keterlibatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Akan tetapi belum berjalan efisien dan belum terlaksana sesuai arah kebijakan. Ini terlihat dari kewenangan Desa dalam menetapkan program peningkatan pelayanan Publik dalam APB Desa, upaya dalam peningkatan pelayanan publik dimaksud ialah peningkatan gizi masyarakat dan pecegahan *stunting* di tingkat Desa. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan pencegahan *Stunting* diperlukan keterpaduan data Konvergensi pencehahan *stunting* yang meliputi;

- Data Primer
- Data sekunder
- Data analisa kebutuhan penyusunan kegiatan pencerahan di desa
- Data terintegrasi.

Dari 4 (empat) keterpaduan data konvergensi diatas belum dijalankan dengan baik. Serta sosialisasi kebijakan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati pasal 4 huruf a, yang tidak berjalan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan implementasi Kebijakan penanganan *stunting* di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso tidak efektif.

Terkait implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* penulis mangaitkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwar III (Subarsono : 1990) yang terdiri dari 4 (Empat) variable yaitu (1) pada aspek komunikasi, menunjukkan peranan penting sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Berarti komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerpan kebijakan tidakkeluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten. Dari hasil observasi penulis

menyatakan bahwa masyarakat Desa yang berada dikecamatan Lore Tengah masih minim mendapatkan informasi terkait *stunting* dan kurang tepatnya sasaran pada kasus stunting pada ibu hamil dan Bayi 0-59 bulan; serta informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui yang meliputi inisiasi menyusu dini, air susu ibu eksklusif, keluarga berencana dan pendidikan reproduksi termasuk upaya pencegahan *Human Immune Deviciency Syndrome* HIV/AIDS dari ibu ke anak yang kurang terlaksana dengan baik. (2) Aspek sumber daya, variable ini bukan hanya mencakup faktor sumber daya manusia/aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya material dalam hal ini ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif. Kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam bidang *stunting* serta kurangnya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang dimiliki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait secara terus menerus di Kecamatan Lore Tengah, (3) Aspek disposisi, variable ini diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksanaan untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan dan keinginan untuk menerapkannya. (4) Aspek Struktur Birokrasi, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan Dinas Kesehatan, Kecamatan, Puskesmas serta Desa.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Secara etimologi istilah kebijakan publik terdiri dari dua suku kata yaitu kebijakan atau *policy* dalam bukunya Poerwadarmita Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984:138): diartikan dengan beberapa makna, kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) kebijakan diartikan sebagai berikut:

“Kebijakan rangka konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”.

Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan mengenai pengertian kebijakan publik, dan kesemuanya tidak ada yang keliru dan saling melengkapi. Berbagai pandangan para ahli dalam mendefinisikan kebijakan `public membuktikan bahwa kebijakan public tidak bisa dimaknai secara seragam. Masing-masing dari para ahli memiliki perspektif dan pemaknaan yang berbeda-beda. Namun demikian, kebijakan secara umum dimaknai sebagai, “serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka dengan demikian kepentingan rakyat adalah keseluruhan yang utuh dari paduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2013:99), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Standard dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

3. Hubungan antar Organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu : (1) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; (3) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administrasion* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah : melakukan *Standar Oprating Prosedures (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivita-aktivitas pegawai diantara beberapa beberapa unit kerja.

Edwards III dalam Winarno (2005:150) menjelaskan tentang "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi" sebagai berikut :

"Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

"SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi".

"Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes

dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2014:209) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik.(Winarno,2014:210):

”*Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk”.

”*Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas mengenai definisi, teori-teori / model tentang implementasi kebijakan publik penulis dapat menyimpulkan bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan satu tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik dimana suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan tidak akan berarti/bermanfaat apabila kebijakan tersebut tidak di implementasikan.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori George Edward III sebagai alat analisis. Adapun yang menjadi alasan penulis menggunakan teori ini dalam penelitian penulis berkaitan dengan implementasi kebijakan Penanganan Stunting dapat dilihat dari 4 aspek dan sub aspek yang termuat dalam teori Edward III.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian secara kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia Catherine Marshal (1995) dalam Sarwono J (2006:193). Dasar penelitian ini menunjukkan beberapa kata kunci, yaitu: proses, Pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian secara kualitatif, oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian harus lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata yang berwujud atau pernyataan-pernyataan verbal tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian melalui berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, analisis dokumen dan diskusi terfokus. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan deskripsi berdasarkan proposisi teori untuk menemukan solusi terhadap kendala yang terjadi dengan mengintegrasikan teori dan metode penelitian.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti akan mendeskripsikan, menulis dan mempresetasikan secara rinci dalam penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kecamatan Lore Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso No.36 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Lore Tengah. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Lore Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka pada tanggal 29 September 2001 Bupati Poso meresmikan Kecamatan Lore Tengah dengan pusat

Pemerintahan Ibu Kota Kecamatan terletak di Desa Doda. Penduduk Lore Tengah mayoritas adalah suku etnis Behoa dan sebagian suku Bugis, Seko dan Toraja.

Secara geografis Kecamatan Lore Tengah terletak pada bagian Timur wilayah Kabupaten Poso dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Kecamatan Lore Utara di sebelah Utara, Kecamatan Lore Barat di sebelah Selatan, Kecamatan Pamona Utara di sebelah Timur, dan Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Biromaru di Sebelah Barat.

Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan data yang ditemukan secara faktual di lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang mengacu pada teori implementasi menurut Edward III, ada empat hal penting yang harus diperhatikan bahwa pelaksana kebijakan yang melaksanakan harus mengetahui apa yang mereka lakukan sehingga implementasi kebijakan dapat terlaksana kemudian akan dikaji dengan memakai 4 (empat) cara yaitu :

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan stunting.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan stunting dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Kegiatan komunikasi untuk memastikan apakah implementasi sudah sesuai dengan isi kebijakan publiknya. Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan.

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Penyaluran informasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Transmisi dalam Implementasi Pencegahan Stunting di Desa Rompo dan Desa Baleura Kecamatan Lore Tengah berupa penyampaian informasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa kemudian diteruskan kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara bahwa selama ini sosialisasi tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat di desa sangat penting karena hal ini menyangkut dengan kesehatan masyarakat. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pihak terkait seperti BKKBN Kabupaten Poso, Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas Doda dalam berbagai kegiatan baik itu yang dilaksanakan setiap bulannya maupun per triwulan dengan melibatkan lintas sektor yang ada di Kecamatan Lore Tengah. Namun dalam hal ini terdapat masih kurangnya sumber daya manusia dari kader kesehatan yang ada di desa dalam menyerap informasi tentang pencegahan stunting. Sehingga hal ini menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara jelas dan terperinci kepada masyarakat. Dipihak lain masih ada desa yang belum benar-benar serius dan konsisten dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat desa.

b. Kejelasan

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa terdapat adanya kejelasan pesan yang disampaikan dari para pelaksana kebijakan implementor, walaupun dari sisi lain masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman Pemerintah Desa khususnya Desa Baleura karena setiap kegiatan sosialisasi Kepala Desa tidak menghadiri secara langsung tetapi hanya diwakili oleh perangkat desa. Hal ini menyebabkan informasi yang tidak jelas kepada pemerintah sehingga dalam hal ini pemerintah hanya menyediakan anggaran tetapi tidak terlibat langsung secara aktif.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan indikator ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi. Konsistensi yang dimaksud adalah melihat bagaimana konsistensi dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Pencegahan Stunting di Kecamatan Lore Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan kepada target group (masyarakat), artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan atau kontradiktif.

Edward III (dalam Agustino, Leo. 2012:150-154) menyatakan bahwa Persyaratan pertama agar implementasi kebijakan dapat berfungsi efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan secara tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi seperti ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksananya karena komunikasi membahas 3 (tiga) hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi,

Dalam hal komunikasi terhadap implementasi kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Transmisi kebijakan Penanganan Stunting sudah dilaksanakan oleh Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada Camat, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Bidan Desa dan Kader-kader Kesehatan yang ada di desa. Hasil penelitian menemukan bahwa untuk Desa Rompo transmisi sudah berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan angka stunting terendah di Kecamatan Lore Tengah. Berbeda dengan Desa Baleura peneliti menemukan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam hal penanganan stunting dalam hal ini dibuktikan dengan ketidak aktifan dalam mengikuti sosialisasi baik dari pihak Kabupaten maupun Kecamatan sehingga informasi tidak tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya (*resources*) yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana kebijakan. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, kesiapan sumber daya pelaksana kebijakan public adalah hal penting untuk diperhatikan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan mungkin telah disampaikan dengan akurat, jelas dan konsisten, namun apabila para pelaksana kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, pelaksanaan kebijakan seperti nya akan menjadi tidak efektif.

Kesiapan sumber daya meliputi kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi yang memadai, kewenangan yang diberikan kepada pelaksana serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan. Kompetensi pelaksana kebijakan menentukan kualitas pelaksana kebijakan tersebut. Ketersediaan tenaga/personil yang cukup untuk pelaksanaan kebijakan adalah juga menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksana kebijakan

Kompetensi SDM memiliki peran yang sangat menentukan dalam upaya mengubah dan meningkatkan kinerja organisasi. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan Penanganan Stunting, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun dalam hal ini mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya.

Sumber daya merupakan indikator kedua setelah komunikasi yang akan turut mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan merupakan segala sesuatu yang digunakan guna mendukung terhadap berhasilnya kebijakan yang diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Doda penanggung jawab program gizi di Puskesmas Doda belum sesuai dengan kompetensi yang ada, atau tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Dalam hal ini yang menangani adalah dari Kesmas. Juga ditemukan bahwa sumber daya manusia dalam hal kader kesehatan yang masih rendah, kader kesehatan yang aktif masih sangat terbatas sehingga perlu adanya dukungan dari kader di tingkat Rt/Rw agar pro aktif untuk membantu dalam melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat desa di wilayahnya masing-masing, dan dalam melaksanakan

kebijakan tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat desa sudah adanya aturan dan mekanisme yang jelas dari mulai tingkat desa sampai dengan pelaksanaan di tingkat Rt/Rw, namun karena kurang fokus sehingga masih ada sebagian kader yang kurang memahaminya, selain itu kewenangan dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting terhadap masyarakat di desa merupakan kebijakan dari pemerintah desa dengan di bantu oleh kader kesehatan desa sebagai pelaksana dilapangan, namun memang selama ini komunikasi yang kurang baik sehingga kesulitan untuk melaksanakan kebijakan di lapangan, serta fasilitas pendukung memang belum lengkap tetapi minimal para kader dapat memaksimalkan kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan stunting dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di desa, seperti memaksimalkan Poskesdes yang ada di desa.

3. Disposisi

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen dapat disimpulkan bahwa setiap pelaksana kebijakan telah memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan penanganan stunting khususnya di tempat kerja mereka. Namun dalam hal ini komitmen saja tidak cukup untuk mensukseskan sebuah program, dalam hal ini Program Percepatan Penanganan Stunting. Komitmen ini harus dibarengi dengan kinerja yang baik dan terintegrasi secara terarah dengan mengedepankan aturan dan kebijakan. Tanpa kinerja yang baik, seberapapun kuatnya komitmen, tidak akan menghasilkan apa-apa.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah, guna mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu. Faktor birokrasi pembagian kerja dalam implementasi kebijakan publik, menunjukkan pelaku-pelaku ahli dan profesional dalam tindakan-tindakan mengimplementasikan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa selama ini SOP dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting sangat penting agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan dan hal itu perlu di pahami oleh semua pelaksana sampai pada kader kesehatan di desa, namun memang masih ada beberapa kader yang kurang mempelajarinya sehingga kurang memahami secara jelas dan terperinci, selain itu dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting terhadap masyarakat desa perlu adanya standar kerja yang jelas agar dapat melaksanakannya secara optimal, namun memang terkadang belum terlalu dipahami secara jelas dan terperinci, hal ini akan mempersulit dalam melaksanakannya di lapangan, serta perlu adanya pembagian tanggung jawab terhadap para kader kesehatan di desa sehingga dapat lebih terfokus dan dapat memaksimalkan kebijakan pencegahan stunting terhadap masyarakat desa, namun karena tidak meratanya tingkat pemahaman dari para kader sehingga kesulitan dalam melakukan pembagian tanggung jawab terhadap para kader. Untuk di Kecamatan Lore Tengah struktur birokrasi dalam penanganan stunting sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Camat Lore Tengah untuk pembagian tugas masing-masing, dan juga petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP yang ada.

Dari pendapat Friedrich (Winarno, 2012:16) memberikan pengertiannya sebagai berikut: “Kebijaksanaan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”. Dengan demikian dalam melaksanakan kebijakan program perlu di dukung dengan SOP

dan standar kerja yang jelas agar dapat mempermudah dan dapat meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu perlu adanya tanggung jawab moral dari para pelaksana di lapangan agar dapat optimal dalam melaksanakan kebijakan program kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena berdasarkan Teori Edward III yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) aspek, bahwa masih terdapat 2 (dua) aspek yang kurang berjalan secara optimal. Namun berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa terdapat 2 (dua) aspek yang sudah berjalan secara optimal yaitu aspek disposisi para implementor yang cukup mendukung implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kab. Poso, aspek kedua yang dinilai berhasil adalah struktur birokrasi yang sudah berjalan dengan baik, dimana semua implementor sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Aspek yang dinilai belum berhasil atau belum optimal dalam pelaksanaannya yaitu aspek Komunikasi dan aspek Sumberdaya. Dimana pada aspek komunikasi, sosialisasi tentang Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso dirasakan masih kurang sehingga masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso. Sedangkan aspek sumber daya, untuk sumber daya manusia bahwa ditemukan tenaga kesehatan yang berperan sebagai penanggung jawab dalam program ini belum memenuhi syarat yang seharusnya penanggung jawab / pemegang program ini adalah tenaga kesehatan / tenaga gizi yang berkompeten dalam bidangnya, selain itu juga masih kurangnya pemahaman Kader kesehatan yang ada di desa terhadap penanganan stunting sehingga hal ini berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso masa datang. Bahwa Sosialisasi terhadap kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso perlu diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan Penanganan Stunting, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan Penanganan Stunting di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso. Untuk Sumber daya manusia, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso agar dapat menyediakan sumber daya manusia dalam hal ini Tenaga Kesehatan khususnya tenaga gizi yang berkompeten dalam bidangnya untuk ditempatkan di Puskesmas. Bagi tenaga kesehatan lainnya seperti kader kesehatan perlu diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan khususnya Penanganan Stunting. Sumber daya dalam bentuk dukungan dana melalui APBDes kedepannya kiranya dapat ditingkatkan sehingga mencukupi untuk kebutuhan penanganan stunting yang ada di desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengakui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah mendapat banyak bantuan, petunjuk, dan arahan dari tim pembimbing dan anggota tim pembimbing. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta.
- Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting BAB II
Tentang Strategi Nasional Percepatan Penanganan Stunting.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso No.36 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Lore Tengah.
- Subarsono, Ag. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno, 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*.Yogyakarta : CAPS (Center of Academi Publishing Service).